
Tata Cara Peralihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Akta

PERALIHAN HAK ATAS TANAH #pembekalanuppat Syarat dan Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah (Balik Nama Sertipikat Tanah) peralihan hak atas tanah Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah Non Hak Menjadi Sertifikat TURUN WARIS (PERALIHAN HAK ATAS TANAH KEPADA AHLI WARIS) Jangan Tertipu, Begini Hukum Peralihan Hak Atas Tanah yang Sebenarnya PEWARISAN TANAH : PROSES IMPLIKASINYA DALAM PERALIHAN HAK MILIK Peralihan Hak Lelang | Waktu, Biaya dan Syarat | Sangat Mudah! Langkah Mengubah Status Tanah Girik Menjadi Sertifikat Hak Milik Cara Mengetahui Status Tanah Garapan || Obrolan 'Bang Dhani' #27 Perusahaan Yang Boleh Mempunyai Hak Milik Atas Tanah : Ini Syaratnya!! JUAL BELI TANAH GIRIK, AMAN? PROSEDUR DAN SYARAT PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (AJB) TANAH DAN BANGUNAN BK Sertifikat Hak Atas Tanah - Begini Ulasannya || Obrolan 'BD' #30 Cara mudah mengetahui pemilik tanah PUNYA TANAH GIRIK? YUKK URUS KE BPN AGAR

BISA PEROLEH SERTIFIKAT.. INTIP TAHAPANNYA Terbaru ! Cara Membuat Sertifikat Tanah tahun 2023 via Online inilah cara mengurus balik nama pajak sppt pbb agar sesuai dengan nama di sertifikat tanah Hibah cara membuat dan mengurus Akta Hibah Prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah/balik nama Peralihan hak tanah adat menjadi milik Pribadi dan Penyertifikatannya Peralihan Hak Atas Tanah Yuk simak video berikut untuk mengetahui apa aja syarat Permohonan Peralihan Hak

☐☐#KantahBangli Cara Peralihan Hak Waris Tanah☐☐ PROSES DAN BIAYA PERALIHAN HAK ATAU BALIKNAMA SERTIPIKAT HAK MILIK Alur dan tata cara pendaftaran Permohonan Hak Milik Perorangan (Pendaftaran Tanah Pertama Kali) Tata Cara Perolehan Hak atas Tanah (Video Animasi Pendidikan) Begini Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya

Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

WICSTH 2021

Awas Jangan Beli Tanah Sengketa

Hukum Agraria Indonesia

Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah

Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya

Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia

Hukum Pertanahan

Awas Jangan Beli Tanah Sengketa
Perpajakan Indonesia
Kepastian hukum pendaftaran hak atas tanah di Indonesia
Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta
yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum
ASPEK HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
Sistem Hukum Benda Nasional
QnA Substansi Notaris dan PPAT Dalam Praktik

*Tata Cara
Peralihan Hak
Tanah Dan
Bangunan
Dengan Akta* *OMB No.
0307358492597
edited by*

ABBEY KEY

Peralihan Hak Atas Tanah
dan Pendaftarannya
Galangpress Publisher
Buku ini disusun untuk
membantu calon peserta

Ujian PPAT agar dapat
memahami norma-norma
hukum yang diujikan
dalam bentuk tanya jawab
dan soal-soal yang pernah
diujikan oleh Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan
Nasional. Sehingga
dengan adanya buku ini
diharapkan bisa

menjawab soal-soal yang
diujikan dengan baik dan
tepat. Terdiri atas dua
belas bab dalam buku ini
meliputi: Bab 1
Pendahuluan Bab 2
Organisasi Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Bab 3 Hukum
Pertanahan Nasional Bab

<p>4 Hak Atas Tanah Bab 5 Pendaftaran Tanah Bab 6 Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bab 7 Pembuatan Akta PPAT Bab 8 Kode Etik PPAT Bab 9 Tanya Jawab Soal Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tahun 2017 Bab 10 Tanya Jawab Soal Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2016 Bab 11 Tanya Jawab Soal Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2015 Bab 12 Tanya Jawab Soal Ujian yang Tetap Keluar dalam Pelaksanaan Ujian Pejabat Pembuat</p>	<p>Akta Tanah (PPAT) dari Tahun 2017, 2016 dan 2015. <u>Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)</u> Elex Media Komputindo This is an open access book. The 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT) will be an annual event hosted by Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali. "Business Law and Local Wisdom in Tourism" has been chosen at the main theme for the conference, with a focus</p>	<p>on the latest research and trends, as well as future outlook of the field of Call for paper fields to be included in ICBLT 2022 are Local Wisdom (Customary Law); Law on Business, Business Competition, and Prohibition of Monopoly; Law on Land and Environment; Law on Investment; Law on Criminal Act of Corruption and Asset Recovery Law on Licenses and Labor; Law on Tourism; Law on Transportation; Law on Immigration Intellectual Property Rights; and Law</p>
--	---	--

on Resolution of Tourism Investment and Business Disputes. This international seminar aims to facilitate scholars, researchers, practitioners, and students to share their thoughts on the latest trends on Business Law and Local Wisdom in Tourism whilst building network in an engaging environment. The participants of this conference will have a chance to enrich knowledge and discuss common challenges and offer creative solutions. By this, we hope to

enhance and contribute knowledge for a better civilized community. *WICSTH 2021* Sinar Grafika Tanah tidak dapat dipungkiri merupakan elemen yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nilai ekonomi tanah akan meningkat karena kebutuhan manusia dan luas tanah relatif tidak bertambah. Oleh karena itu, tidak heran tanah memiliki berbagai dimensi strategis yang sangat rawan dengan konflik dan

sengketa. Salah satu upaya mencegah dan meminimalisir konflik dan sengketa menyangkut tanah adalah mewujudkan tertib administrasi pertanahan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah. Sasaran sistem pendaftaran tanah adalah mewujudkan kepastian hukum seluruh bidang tanah di Indonesia. Pemberlakuan UUPA dengan peraturan turunan yang terakhir, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Berbagai aturan mengenai prosedur dan persyaratan tentang kegiatan menyangkut pendaftaran tanah disusun agar semua pihak yang berkepentingan dengan tanah mengetahui status tanahnya dan dapat memperoleh tanda bukti haknya. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group. [Awas Jangan Beli Tanah Sengketa](#) Pustaka Peradaban

Buku ini berisi tiga pokok bahasan besar, yaitu: Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun. Ketiga pokok bahasan besar tersebut diatur dalam Hukum Tanah Nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan sebutan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun merupakan

hak atas penguasaan atas tanah yang bersifat perseorangan yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh orang per orang warganegara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum privat, atau badan hukum publik. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

HUKUM AGRARIA INDONESIA

Deepublish
Buku ini menjelaskan segala segi yang perlu diketahui khalayak,

terutama para Magister Kenotariatan dan Mahasiswa Fakultas Hukum, tentang ketentuan umum pendaftaran tanah, objek yang menjadi subjek pendaftaran, sertifikat sebagai tanda bukti hak, dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup **Hak Atas Tanah, Hak**

Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah WiKeupedia Buku ini mnegkaji secara utuh dan menyeluruh ruang lingkup keberadaan hak-hak atas tanah di Indonesia, baik hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum perdata barat. Dikaji pula macam-macam pemindahakan hak atas tanah dan peralihan (konversi) hak atas tanah setelah Undang-Undang pokok Agraria (UUPA)

diberlakukan. Di samping itu, dipelajari tentang lembaga hukum pendaftaran tanah terkait sistem pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, aturan-aturan pendaftaran tanah, pejabat pendaftaran tanah, dan berbagai permasalahan yang kerap timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Diulas pula perrbandingan pendaftaran tanah di berbagai negara, serta beberapa yurisrudensi seputar jual beli dan pendaftaran tanah yang dianalisis secara objektif

dalam bingkai teori dan asas hukum pertahanan. Buku yang berkualitas ini patut dibaca oleh kalangan akademis, praktis hukum pertahanan, kalangan perbankan, aparat pemerintah, pihak pengembang, dan masyarakat umum yang ingin memahami dengan baik eksistensi dan permasalahan hak atas tanah dan pendaftarannya di tanah air.

Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya Sinar Grafika

1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity will be an annual event hosted by Warmadewa Research Institution, Universitas Warmadewa. This year (2021), will be the first WICSTH will be held on 7 - 8 September 2021 at Auditorium Widya Sabha, Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Indonesia. In the direction of a new life order during pandemic COVID-19, Science, technology and humanity especially in ecotourism is a crucial topic to address,

this is a momentum to bring together various critical views and thoughts from various fields of science related to strategies that can be done in developing and solving ecotourism resilience during pandemic COVID-19 in Science, technology and humanity study. The conference invites delegates from across Indonesian and is usually attended by more than 100 participants from university academics, researchers, practitioners, and professionals across a

wide range of industries.
Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia
MediaPressindo
Buku ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai pendekatan, yang pernah diundangkan Indonesia sejak awal merdeka sampai tahun awal tahun 2020. Penulis buku, tampaknya ingin menyampaikan sesuatu pada khalayak bahwasanya ada pungutan jika orang pribadi atau korporasi

hendak mengurus sertipikat hak atas tanah. Dan, disampaikan juga di buku ini, bahwasanya pemilik tanah atau penggarap dan/atau siapa saja yang mendapat peningkatan keekonomian dari tanah dan/atau bangunan dipastikan menjadi obyek pungutan pajak maupun pungutan non-pajak. Masih diterangkan di dalam buku ini, bahwa pungutan pajak yang beragam jenis tidak hanya ada di Indonesia, tetapi hampir semua negara mempraktikkan hal yang

sama, sepertinya tepat jika kemudian Penulis buku ini membahas aneka macam pungutan pajak pertanahan di negara lain. Masih menurut buku ini, pungutan yang benar adalah pungutan yang dilandasi oleh aturan hukum yang telah disetujui oleh wakil rakyat di DPR maupun di DPRD. Tidak heran jika bertitik tolak dari pemikiran ini, berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pungutan sejak dari Indonesia merdeka sampai tahun

2020 ditulis dengan utuh, runut, dan runtut.

Menariknya yang menjadi alasan buku ini ditulis, sebagaimana yang disampaikan di pengantar, akibat adanya eks Kepala BPN Denpasar yang bunuh diri karena menjadi Tersangka Pencucian Uang dengan sangkaan telah menerima banyak pungutan uang dari pensertipikatan tanah dan itu menjadi alasannya yang pertama. Alasan yang keduanya, adanya hasil penelitian yang disampaikan guru besar emeritus di webinar di

akhir tahun 2020 yang mengatakan ada pungutan ribuan kali dari pungutan resmi jika korporasi hendak mensertipikatkan tanah skala besar. Inilah yang kemudian, materi buku ini menjadi urgent, agar pejabat dan/atau orang pribadi atau korporasi tidak terjebak pada praktik pungutan yang tidak diatur oleh undang-undang. Pesan penting dari isi buku ini, praktik-praktik pungutan yang dapat menjadikan Tersangka Pencucian Uang dan/atau tindak

pidana tipikor akan dapat berurusan dengan penegak hukum.

Hukum Pertanahan Awas Jangan Beli Tanah Sengketa

Pembelian dan penjualan tanah harus disertifikasi oleh Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Prosedur dimaksudkan untuk memastikan kepastian hukum dan ketertiban ketika membeli dan menjual real estat. Anda dapat membeli dan menjual tanah hanya di tanah yang Anda miliki. Hak atas tanah, yaitu

suatu benda tanah yang disahkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah Sertifikat PPAT pada dasarnya adalah sertifikat asli yang berisi: kebenaran formal dan material. PPAT wajib membuat sertifikat Seperti yang ditentukan dan sebelum proses pembuatan Sertifikat PPAT mengharuskan perusahaan untuk memeriksa sertifikatnya Hak atas tanah dalam Daftar Tanah. Sinopsis Penulis yang merupakan seorang Notaris, PPAT, NPAK, dan Dosen ingin

berbagi ilmunya dalam buku ini. Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya akan mengajarkan Anda tata cara dari berbagai permasalahan tentang tanah. Sewa Menyewa Tanah & Rumah Hak dan Kewajiban Jual Tanah & Rumah Contoh-Contoh Surat Perjanjian Cara Mengurus Sertifikat Tanah Cara Mengurus IMB, IPB, KMB, Girik Perbedaan Istilah Hak Guna, Hak Sewa, Hak Pakai, Hak Milik Syarat-Syarat Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) Syarat

Pembuatan Akta Hibah (ke PPAT) Proses Sertifikasi dan Ganti Nama Batalnya Jual-beli Tanah atau Bangunan (rumah) Resiko dalam jual-beli Mengulang Sewakan Nilai Harga Sewa Persyaratan dan Proses Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan (Rumah) Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Surat Kuasa Disertai Cara Menghitung Pajak dari Peralihan Hak Atas Tanah Detail Format : Soft cover Jumlah halaman : 372 halaman Tanggal terbit : 5 Maret 2018 Penerbit :

Legality Penulis : Dyara Radhite Oryza Fea
 Panjang : 20 cm Lebar :14 cm Berat : 0.310 kg ISBN : 9786026595621 Bahasa : Indonesia
Awas Jangan Beli Tanah Sengketa Jaja Zakaria, SH, MSc
 TEMUKAN JAWABANNYA
 DI buku ini ! Sudah menjadi rahasia umum bahwa sengketa tanah kerap terjadi di Indonesia. Untuk itu, sebagai pemilik lahan tentu harus lebih waspada lagi agar terhindar dari kasus sengketa tanah. Dengan semakin mendesaknya

peran dan manfaat tanah terhadap kehidupan makhluk hidup, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dengan ketentuan hukum agar pemanfaatan tanah bisa optimal dan dapat memberikan kesejahteraan semua makhluk hidup, khususnya manusia. Dalam kepemilikan semua kebendaan khususnya tanah, harus dilengkapi bukti kepemilikan yang sah, agar ada kepastian hukum. Apabila kepemilikan tanah tidak dilengkapi dengan alat

bukti yang sah, maka kepemilikannya tidak akan dijamin oleh ketentuan hukum.

PERPAJAKAN INDONESIA

Kaifa
 Cukupkah Surat Girik, Letter C, Letter E, petuk pajak, pipil, kikitir, rincik, IPEDA, Verponding, atau Landrete menjadi satu-satunya bukti kepemilikan atas tanah yang sah? Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 1960 Nomer 34/k/Sip/1960 surat-surat ini bukan bukti atau tanda

mutlak akan kepemilikan hak atas tanah oleh orang yang namanya tercantum dalam lembaran surat ini. Lantas bagaimana mendapatkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan memiliki kepastian jaminan hukum? Badan Pertanahan Nasional atau BPN adalah satu-satunya lembaga non departemen yang ditunjuk pemerintah untuk menerbitkan sertifikat tanah yang sah dan bernilai hukum. Buku terbitan Pustaka Grhatama (Galangpress) ini menjelaskan

mekanisme pengurusan berbagai pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Tidak hanya itu, penulis juga menjelaskan satu demi satu persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan izin sekaligus cara memperolehnya. Satu lagi, berbagai tips dipastikan akan menolong Anda mengamankan tanah dan properti dari klaim pihak lain dan menghindarkan Anda dari praktik calo yang merugikan. Mari selamatk aset-aset kita!

Kepastian hukum pendaftaran hak atas tanah di Indonesia
GUEPEDIA
Awas Jangan Beli Tanah Sengketa
MediaPressindo
Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum
Airlangga University Press
Real Estate Rich Penulis : Muzaache
Ukuran : 14 x 21 cm
ISBN : 978-623-270-790-0
Terbit : Desember 2020
Sinopsis : “Kami sangat merekomendasikan buku-

buku serial The Property Series ini kepada para pembaca yang ingin mempelajari atau terjun dalam dunia properti.” HM. Rizal Effendy, SE Walikota Balikpapan “Kami menyambut baik dan sangat mendukung kehadiran buku serial The Property Series ini yang merupakan buah karya salah satu putra daerah Balikpapan.” Abdulloh, S.SOS Ketua DPRD kota Balikpapan Buku Real Estate Rich ini hadir ke tengah-tengah masyarakat sebagai pelengkap buku tentang

bisnis perumahan atau properti yang sudah beredar sekarang ini. Sistematika penulisan buku ini kami susun berdasarkan titik awal dari perencanaan suatu kawasan perumahan sampai terbentuknya kawasan perumahan tersebut. Kemudian pada akhirnya adanya pengelolaan Estate and Community Service Management. Sehingga bisa dikatakan buku ini menjadi buku petunjuk paling lengkap untuk menjadi pengusaha pengembang perumahan

di Indonesia. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
ASPEK HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN Pustaka Yustisia
 “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal

pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Sistem Hukum Benda

Nasional Gramedia

Pustaka Utama

Buku ini merupakan kumpulan studi terhadap dinamika hukum agraria dan ekonomi yang terkait dengan problem di atas, seperti pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentingan umum, peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, pembatasan luas penguasaan dan pemilikan tanah, bank tanah, dan konflik agraria. Agar lebih aktual, isu mutakhir menyangkut pemberlakuan kebijakan UU Cipta Kerja (yang kemudian diubah melalui Perppu Cipta Kerja) yang berimplikasi pada aspek agraria juga dikaji dalam buku ini.

QnA Substansi Notaris dan PPAT Dalam Praktik
Penerbit Andi

Document for Property Business PENULIS:
Muzaache Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-281-779-1 Terbit : Agustus 2020
www.guepedia.com
Sinopsis: “Kami sangat merekomendasikan buku-buku serial The Property Series ini kepada para pembaca yang ingin mempelajari atau terjun dalam dunia properti.”
HM. Rizal Effendy, SE
Walikota Balikpapan
“Kami menyambut baik dan sangat mendukung kehadiran buku serial The Property Series ini yang

merupakan buah karya salah satu putra daerah Balikpapan.” Abdulloh, S.SOS Ketua DPRD kota Balikpapan Buku Document for Property Business ini adalah salah satu buku dari buku-buku serial The Property Series. Bekerja di dunia bisnis terutama properti akan membutuhkan dokumen (berupa surat menyurat atau dalam bentuk lain) untuk kepentingan legalitas dan kepastian hukum serta berperan sebagai alat komunikasi. Fokus buku ini adalah dokumen (berupa surat

menyurat atau dalam bentuk lain) yang biasanya digunakan dalam dunia properti. Buku Document for Property Business ini dilengkapi dengan: • 47 contoh dokumen properti yang sering digunakan dalam bisnis properti. • Sistem penomoran surat yang sering digunakan dalam bisnis properti. • Tabel penggunaan 47 dokumen properti. • Daftar Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan dunia properti. Buku ini akan menjadi

referensi penting untuk Anda yang menekuni bisnis properti di Indonesia. Selamat membaca dan sukses buat Anda.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508
Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys

Kencana
Semula buku ini merupakan kumpulan materi sosialisasi dan pendampingan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang

diperbaharui setiap tahunnya, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, atas permintaan para mahasiswa, peserta pengabdian masyarakat serta dorongan rekan-rekan dosen, akhirnya disusunlah buku ini menjadi satu kesatuan buku ber-ISBN yang dapat dipublikasikan secara lebih luas. Buku ini merupakan kelanjutan dari buku “Politik Hukum Pertanahan Indonesia” yang diterbitkan oleh penulis pada awal tahun

2021 dengan topik terkait pendaftaran tanah. Buku ini ditulis berdasarkan hasil kajian, riset, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini disusun sesuai dengan standar kualitas akademik yang akan mempermudah pembaca untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif dan komparatif dalam mempelajari ketentuan tentang penguasaan hak atas tanah. Buku ini juga penting untuk pembaca pada umumnya, untuk mengenal ketentuan

umum, prinsip hukum serta pengetahuan tentang perolehan dan penguasaan atas tanah di Indonesia.

Pot-put & kepala Sinar Grafika

Diskursus tanah merupakan hal yang sangat kompleks, di dalamnya berbagai persoalan hukum berkelindan menjadi satu dan saling berhubungan, mulai dari Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Administrasi Negara dan lain-lain. Diskursus tanah dalam lingkup Hukum Agraria

akan mengundang kita pada pembahasan tanah dari berbagai sisi, baik dari sisi sejarah, kedudukan tanah dalam pandangan negara, dasar berlakunya hukum tanah, surat-surat tanah, letak, luas dan batas-batas tanah dan lain-lain. Sedangkan dalam lingkup Hukum Perdata, akan membawa kita pada pembahasan tentang peralihan hak melalui jual beli yang ternyata belum ada ketentuan hukum yang khusus mengaturnya. Acuan hukum yang dipakai

dalam praktik jual beli tanah selama ini masih rancu. Di satu sisi, Buku II KUH Perdata dicabut oleh UUPA dan jual beli tanah merujuk pada Buku III, ternyata Buku III tak bisa melepaskan diri dari Buku II. Demikian juga dalam hal penyerahan (levering). Jika jual beli tanah merujuk pada Hukum Perdata, maka levering dan berpindahnya hak atas tanah kepada penjual baru akan terjadi setelah balik nama. Namun jika merujuk pada Hukum Adat sebagai dasar pelaksanaan UUPA, maka

levering dan berpindahnya hak atas tanah kepada pembeli terjadi seketika begitu jual beli disepakati dan ada pembayaran meski belum lunas. Dari keadaan demikian, betapa hukum jual beli tanah masih mengandung ambigu hingga UUPA sebagai unifikasi hukum tanah nasional belum sepenuhnya mencerminkan kepastian. Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta yang Mengandung Cacat

Perspektif Negara Hukum ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Panduan Lengkap: Panduan Lengkap, Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Airlangga University Press
Buku Politik Hukum Pertanahan ini diperuntukkan bagi mahasiswa S2 Program Magister Kenotariatan

sehingga uraian di dalamnya juga disampaikan contoh soal yang berguna untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi kasus-kasus pertanahan di masyarakat. Buku ini juga dapat dibaca juga oleh mahasiswa S1 yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Agraria dan Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah (PPHAT) dan juga dapat dibaca oleh

kalangan praktisi.
Mahir Perpajakan Bendahara: Dilengkapi Latihan dan Studi Kasus Perpajakan Bendahara
GUEPEDIA

Dalam buku ini dibahas tentang Konsep Dasar Hukum pada umumnya dan konsep dasar Hukum Ekonomi dan Bisnis, Hukum Perdata dan Hukum Jaminan sebagai dasar dari hukum ekonomi dan bisnis.

Related with Tata Cara Peralihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Akta:

© Tata Cara Peralihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Akta Alchemical Hydra Guide Osrs

© Tata Cara Peralihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Akta Algebra 1 Distributive Property Worksheet

© Tata Cara Peralihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Akta Algebra 1 For 8th Graders